
FORMULASI INSTRUMEN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Akbar Pandu Dwinugraha

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya
Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya
email: ap.dwinugroho@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan atau isu utama terkait lingkungan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aparat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Data di analisis dengan teknik interaktif yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama khususnya bidang lingkungan di Kabupaten Banyuwangi diantaranya tsunami, gunung api dan bencana lain; alih fungsi lahan produktif; pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah); sampah dan sanitasi perkotaan; serta lahan pertanian.

Kata kunci: formulasi, instrumen, kebijakan, lingkungan

FORMULATING ENVIRONMENTAL POLICY INSTRUMENTS IN THE BANYUWANGI REGENCY

ABSTRACT

The purpose of this study to describe and analyze the core issues relating to the environment in Banyuwangi Regency. This research used descriptive research with a qualitative approach. Informants in this study included Development Planning Agency at Regional Level; Environment Agency; Sanitation Agency; Public Works and Regional Road Agency; Public

Works Irrigation Agency; Industry, Trade and Mines Agency; Agriculture Agency; and Regional Disaster Management Agency. Data were analyzed with interactive techniques that included data collection, data reduction, data display and verification. The results showed that the main issues in environment scope in the Banyuwangi Regency including tsunamis, volcanoes and other disasters; conversion of productive land; environmental pollution (water, air and soil); garbage and urban sanitation; as well as agricultural land.

Keywords: formulation, instrument, policy, environment

PENDAHULUAN

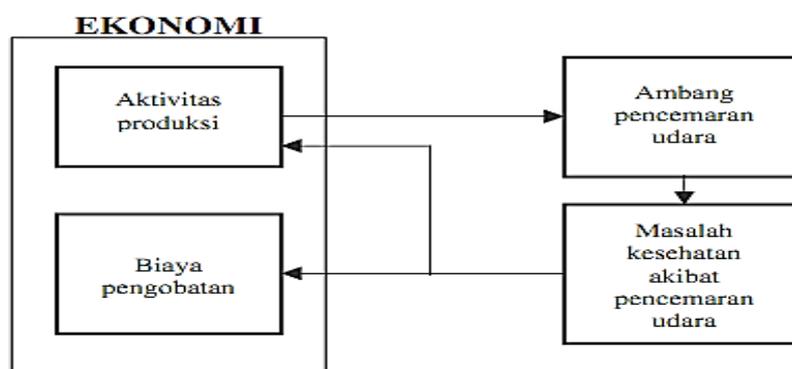
Sun Rise Of Java itulah sebutan untuk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Kabupaten ini bisa dikatakan termasuk yang paling berkembang diantara yang lainnya atau mengalami kemajuan ekonomi sebagaimana yang tertulis dalam judul tulisan ini. Kondisi ini menjadi tidak mengherankan ketika kemajuan ataupun pembangunan suatu daerah diukur melalui pertumbuhan ekonominya (Todaro,1994) Tanpa disangka-sangka bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi menurut data BPS yaitu sebesar 6,76% telah melampaui Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 5,78%. Lebih mengherankan lagi ketika setahun berikutnya yaitu ditahun 2014 bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi juga telah melampaui Pertumbuhan ekonomi nasional yang pada saat itu mengalami penurunan. Dari pertimbangan tersebut banyak pakar yang tidak ragu untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2016 bisa mencapai 7,52%.

Kabupaten Banyuwangi yang notabene sedang berkembang sangat diuntungkan dengan melimpahnya sektor pariwisata yang beberapa waktu ini terdengar ramai ditelinga banyak orang. Sebut saja red island, green bay dan G-land yang saat ini secara sangat cepat menjadi tak ubahnya destinasi pariwisata internasional, padahal itu hanya sebagian dari beraneka macam destinasi yang ditawarkan. Tetapi seketika sektor tersebut menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data yang ada memang betul bahwa pariwisata daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai penunjang paling besar pertumbuhan ekonomi dengan ketercapaian rata-rata 10,47% dalam 4 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dipengaruhi oleh peningkatan modal dan tenaga kerja. Hal ini memang terbukti untuk kabupaten ini. Bagaimana tidak, berdasarkan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ternyata jumlah

nilai investasi berskala nasional Kabupaten Banyuwangi yang ditargetkan mencapai 50 milyar tanpa disangka terealisasi hampir 250% yaitu sejumlah 2.345 milyar rupiah. Peningkatan jumlah nilai investasi daerah sebenarnya bergantung kepada sejauh mana daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk menarik minat daripada investor dan kabupaten ini mampu melakukan itu. Disisi lain, rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi terealisasi melampaui penargetan yang telah ditentukan. Hal ini juga tidak mengherankan karena daya serap tenaga kerja merupakan variabel dependen yang dipengaruhi peningkatan modal.

Sayangnya pembangunan ekonomi dimanapun keberadaannya nanti, sangat berpeluang untuk menggilas keberlanjutan lingkungan terutama pada saat belum adanya *environmental safeguard* sebagai pendukung keberlanjutan lingkungan yang merupakan salah satu bagian dari *environmental governance* (Syakrani, 2011). Kabupaten Banyuwangi yang semakin berkembang dengan pintu masuk sektor pariwisatanya juga tidak mungkin akan menghalangi perkembangan industri dan perdagangan yang nantinya juga berpeluang besar untuk ikut berkembang. Resosudarmo dan Thorbecke (1996) melakukan penelitian terkait hubungan antara perekonomian dan pencemaran lingkungan yang menghasilkan rumusan dalam gambar berikut.

Gambar 1.
Hubungan antara Perekonomian dan Pencemaran Udara



Dari gambar diatas, pencemaran udara merupakan produk sampingan dari aktifitas produksi yang menggunakan bahan beracun. Bahan beracun tersebut diartikan sebagai bahan bakar proses produksi seperti bensin dan solar. Tingkat pencemaran udara yang tinggi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mereka yang terkena gangguan kesehatan tersebut akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara akan mengurangi efektivitas kegiatan produksi. Hal tersebut menjadi siklus yang merugikan pada saat belum adanya

antisipasi untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara akibat kegiatan perekonomian. Maka dari itu diperlukan kajian lingkungan yang menjaga keseimbangan keduanya. Perencanaan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah sebenarnya telah termaktub dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing.

Dokumen perencanaan ditingkat satuan kerja perangkat daerah, kita mengenal istilah renstra yang merupakan kependekan daripada rencana strategis. Di level daerah tingkat II kabupaten/kota, kita mengenal istilah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau lebih familiar disingkat RPJMD. Kedua dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengisyaratkan untuk menjadikan dokumen lingkungan sebagai telaahan. Telaahan yang dimaksud adalah penelaahan terhadap perencanaan pembangunan yang perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan terdegradasinya aspek lingkungan. Banyak khalayak yang menyebutkan bahwa hanya pembangunan dalam bidang fisik saja yang memerlukan telaahan terhadap lingkungan ternyata seluruh daripada program pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini dokumen kebijakan lingkungan tersebut bisa dianggap sebagai representasi daripada *environmental safeguard*.

Kebijakan lingkungan berkelanjutan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Secara konseptual pengertian pembangunan berkelanjutan menurut ahossane (2001) diartikan sebagai “*meets the needs of the present without compromising the capacity to meet the needs of future generations*”. Pengertian tersebut memiliki inti berorientasi pada masa depan dan yang pasti memerlukan integrasi lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi agar lingkungan tidak terdegradasi. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup lingkungan/alam terhadap tekanan dari pada pembangunan ekonomi daerah.

Disisi lain kebijakan lingkungan juga bisa dipahami sebagai muatan yang menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan agar bisa berjalan secara simultan. Hal tersebut termaktub dalam pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Goodland (1995) bahwa pembangunan berkelanjutan dibedakan menjadi empat meliputi kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*), keberlangsungan ekonomi (*economic sustainability*), kelestarian lingkungan (*sosial sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri (*sustainable development*). Goodland mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai integrasi dari tiga aspek yakni kelestarian sosial, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi.

Orang Indonesia pintar dalam membuat kebijakan yang baik, tetapi seringkali salah dalam menentukan permasalahan yang tepat. Maka dari itu penelitian ini memberikan muatan penting tentang apa yang menjadi permasalahan pada saat pembuatan kebijakan (Jones, 1994) dan urgensi diperlukannya perumusan masalah kebijakan lingkungan berkelanjutan sebagai pengejawantahan daripada proses *environment safeguard* dan juga sebagai konsekuensi kemajuan pembangunan perekonomian daerah. Sejauh mana Kabupaten Banyuwangi memperhatikan isu lingkungannya, dampak yang berpeluang terjadi dan apa sebenarnya pengaruh utamanya yang perlu untuk dijadikan pemecah masalah lingkungan kedepan sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi yang telah sebegitu gencarnya dilakukan. Berdasar pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah permasalahan atau isu utama terkait lingkungan di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan atau isu utama terkait lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

LANDASAN TEORETIS

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dalam meningkatkan kehidupan publik itu sendiri (Nugroho, 2009:505). Kita perlu memahami bahwa tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan. Nugroho (2009) meyebutkan salah satu model perumusan kebijakan yang dikenal dengan nama model proses. Dalam model ini dipahami bahwa kebijakan publik merupakan proses politik yang meyeritakan rangkaian kegiatan diantaranya,

1. Identifikasi Masalah
Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
 2. Agenda Formulasi Kebijakan
Memutuskan Isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
 3. Perumusan Proposal Kebijakan
Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
 4. Legitimasi Kebijakan
Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
 5. Implementasi Kebijakan
Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.
-

6. Evaluasi Kebijakan

Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (impact) dan kelompok sasaran dan non sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menggambarkan isu-isu lingkungan sebagai dasar dalam melakukan perumusan masalah utama kebijakan dengan mempertimbangkan integrasi antara kondisi saat ini, dampak negatif yang berpeluang terjadi dan pengaruh utama yang melatar-belakangi permasalahan. Maksud daripada isu-isu lingkungan mencakup segala permasalahan terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan dengan beberapa cara yang meliputi observasi, wawancara mendalam, *forum group discussion*, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sejak Januari 2015. Informan diseleksi menyesuaikan kesesuaian dan kebutuhan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Data di analisis dengan teknik interaktif yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan verifikasi (Miles dan Huberman, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-isu lingkungan merupakan permasalahan terkait lingkungan yang berpeluang untuk menjadi merugikan ketika tidak dilakukanantisipasi. Isu lingkungan di Kabupaten Banyuwangi di dasarkan kepada permasalahan yang selalu dialami dilihat dari ketercapaian indikator kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan data tersebut, isu lingkungan di Kabupaten Banyuwangi meliputi:

- a. Tsunami, gunung api dan bencana lain
- b. Alih fungsi lahan produktif
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)
- d. Sampah dan sanitasi perkotaan
- e. Lahan pertanian

Kelima isu lingkungan diatas akan dilakukan analisa dengan mengintegrasikan kondisi eksisting, implikasi negatif yang terjadi ketika tidak

dilakukan tindak lanjut dan pengaruh utama yang melatarbelakangi permasalahan tersebut berpeluang untuk menjadi lebih buruk sebagaimana berikut.

Tsunami, Gunung Api dan Bencana Lain

Potensi penyebab bencana di Kabupaten Banyuwangi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Namun untuk isu Kabupaten Banyuwangi lebih menitik beratkan kepada isu mengenai bencana alam. Bencana alam yang dimaksud antara lain berupa gempa bumi, tsunami, abrasi, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011.

Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak data dan informasi yang langsung bisa dilihat oleh publik terkait dengan penjelasan mengenai bencana dan wilayah potensi bencana yang ada termasuk juga mengenai laporan yang selalu diupdate setiap harinya untuk beberapa ancaman atau potensi bencana seperti Tsunami, Gunung Berapi dan pergerakan tanah. Hal ini tentu menjadikan salah satu upaya preventif yang dilakukan mengingat Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan di pulau Jawa. Luasnya 5.782,50 km². Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m) terdapat Kawah Ijen, keduanya adalah gunung api aktif.

Permasalahan yang ada adalah BPBD Kabupaten Banyuwangi termasuk instansi yang tergolong baru dijalankan. Implementasi kinerja masih belum menitikberatkan kepada fokus yang jelas karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator terkait bencana hanya dalam hal kebakaran. Sudah pasti instansi terkait belum memiliki *guidance* terkait

indikator apa yang perlu untuk dibuat dan dijadikan acuan untuk mengukur keamanan terhadap bencana alam terlebih lagi pembangunan di sektor ekonomi, industri dan perdagangan berpotensi memunculkan resiko bencana alam, non alam ataupun sosial sekalipun. Berdasarkan data, dampak Negatif bencana yang berpotensi muncul pada kawasan Banyuwangi meliputi resiko bencana tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, resiko abrasi, resiko kekeringan. Berdasarkan kondisi eksisting yang saat ini ada, kelemahan yang dimiliki dan dampak negatif yang berpotensi muncul maka permasalahan kunci yang menjadi pengaruh utama jika terjadinya bencana adalah rendahnya ketahanan bencana di Kabupaten Banyuwangi. Ketahanan bencana merupakan suatu kondisi dimana suatu daerah bisa dianggap tangguh dalam menghadapi bencana. Ketika ketahanan tersebut belum didukung dengan kinerja terukur yang mampu memastikan ketangguhan terhadap bencana bisa dikatakan ketahanan bencana daerah tersebut masih rendah.

Alih Fungsi Lahan Produktif

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di kawasan Asia saat ini sedang mengalami tekanan terhadap ketahanan pangan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun 2009 hingga tahun 2011, yaitu sekitar 2 juta ton. Sebenarnya Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) memberikan harapan untuk terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan isu utama dalam pembangunan Indonesia kedepan. Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai lumbung pangan nasional karena kontribusi pengadaan pangannya yang sangat besar, yaitu sebesar 17% dari total nasional. Namun ironisnya, produksi pangan Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir sedang mengalami penurunan, terutama produksi padi, dan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab sebagai penyedia produksi padi adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kontributor beras terbesar di Jawa Timur, namun beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2010 – 2011, terjadi penurunan produksi padi yang cukup besar, yaitu sekitar 13%. Penurunan produksi tersebut ternyata diikuti juga oleh penurunan luas lahan pertanian pangan (sawah) yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1400 Ha atau penurunan sebesar 2%. Perlu diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian pada periode tersebut relative tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa konversi lahan pertanian pangan akan mempengaruhi produksi pertanian. Dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya pengendalian konversi lahan pertanian pangan untuk

mempertahankan ketahanan pangan. Kecamatan Wongsorejo merupakan salah satu kawasan pertanian Kabupaten Banyuwangi dengan konversi lahan pertanian pangan tertinggi. Berdasarkan kondisi diatas dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dan permasalahan kunci dalam hal ini adalah tingginya konversi lahan pertanian. Tingginya konversi lahan pertanian secara sistemik akan menurunkan produktifitas lahan pertanian dan produksi hasil pertanian. Semakin buruknya hal tersebut akan mengancam keamanan pangan Kabupaten Banyuwangi.

Pencemaran Lingkungan (Air, Udara, Tanah)

Potensi dan kekayaan sumber daya alam wilayah Kabupaten Banyuwangi selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan didayagunakan untuk kepentingan pembangunan dan diantaranya sumber daya alam yang ada masih banyak yang belum didayagunakan dan dimanfaatkan.

Pada umumnya pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam kurang memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya belum dilakukan secara efektif dan efisien, disamping itu perlakuan terhadap sumber daya alam cenderung eksploitatif tanpa diimbangi upaya konservasi dan rehabilitasi yang memadai sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kecenderungan ini selain beresiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup juga dapat merusak struktur dan fungsi ekosistem.

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki berbagai jenis usaha/kegiatan baik bidang perikanan, perkebunan dan infrastruktur lainnya, apabila dalam proses kegiatannya tidak diolah dan dikeloladengan baik, maka dimungkinkan dapat sebagai sumber pencemar bagi lingkungan hidup sekitar bahkan secara terakumulasi bisa menimbulkan pencemaran bagi masyarakat Banyuwangi. Aspek lingkungan hidup sangat terkait dengan perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk telah menyebabkan meningkatnya beban lingkungan. Rata-rata sampah meningkat dari 912,5 kg per hari tahun 2005 menjadi 2,9 ton per hari tahun 2008. Demikian pula beban pencemaran limbah industri, mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan Tahun 2010 menunjukkan bahwa 20 % pengusaha yang dipantau tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan, hanya 5 % pengusaha yang memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut. Pengusaha tidak memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. Masih ada pengusaha yang tidak memisahkan saluran pembuangan

limbah cair dengan saluran limpahan air hujan, Semua pengusaha tidak menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data tersebut, dampak Negatif yang Ditimbulkan adalah tingginya keterjangkitan penyakit di masyarakat. Permasalahan Kunci yang bisa diidentifikasi adalah Jumlah penduduk, pertumbuhan industrialisasi dan gaya hidup masyarakat yang tidak ramah lingkungan.

Sampah dan Sanitasi Perkotaan

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga setiap harinya. Penanganan sampah merupakan kegiatan utama Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Kondisi pada tahun 2013 terpaparkan bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 74,8%, pencapaian ini melebihi target akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 60%. Sayangnya kondisi ini tidak membuktikan bahwa dalam pelaksanaannya pihak terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi tidak mengalami kendala.

Kendala yang seringkali masih menjadi hambatan adalah alat dan tenaga oprasional pengangkut sampah yang sangat terbatas, karena jumlah sampah industri, rumah tangga yang semakin hari semakin tinggi, sangat membutuhkan lahan baru sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Kecanggihan teknologi juga dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dampak yang akan dihadapi pada saat hal penanganan sampah belum memiliki solusi adalah sangat mempengaruhi kebersihan dan keindahan kawasan perkotaan. Jumlah sampah yang setiap harinya bertambah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat apabila tidak bisa dimanajemen secara baik dan berwawasan lingkungan. Dampak Negatif yang ditimbulkan sistem daur ulang sampah yang rendah akan meningkatkan volume sampah perkotaan, konsumsi masyarakat memicu produksi sampah yang bertambah diperkotaan. Maka dari itu, kunci permasalahan yang mempengaruhi permasalahan yang lainnya adalah tingginya volume sampah di Kabupaten Banyuwangi.

Lahan Pertanian

Sumber daya air yang terpadu dalam bidang pertanian sangatlah penting. Diantaranya dalam pemenuhan fasilitas sarana irigasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut sangat memiliki fungsi penting sebagai pendukung utama lahan pertanian. Data yang didapat dari Kabupaten Banyuwangi diantaranya pencapaian indikator rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi telah mencapai target yaitu

75% di tahun 2013. Target di tahun 2015 adalah sebesar 85%. Kinerja yang nantinya akan dilakukan harus secara terfokus dijalankan karena dari permasalahan yang ada di lapangan adalah masih terdapat banyak saluran irigasi yang belum terinventarisasi, banyak saluran irigasi dengan sistem saluran sederhana (galengan). Dampak yang nantinya akan terjadi pada saat permasalahan belum bisa ditangani adalah debit air dalam sistem irigasi yang ada saat ini akan berkurang dan mempengaruhi pendistribusian air terhadap lahan pertanian.

Data mengenai sumber mata air dalam kondisi debit air stabil di Kabupaten Banyuwangi yang ditargetkan mencapai realisasi 70% di tahun 2013 belum bisa terpenuhi dan hanya terealisasi 60%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sumber air yang dimiliki perorangan, pemerintah dalam hal ini masih belum melakukan kajian daerah-daerah yang memiliki kapasitas debit air tinggi. Jika hal ini berlanjut menjadi permasalahan maka dampaknya adalah daya dukung air sebagai pendukung lahan pertanian akan menurun dan mengakibatkan kekeringan.

Data Mengenai Ketersediaan air untuk irigasi dan lain keperluan. Target pada tahun 2013 yaitu 50% telah tercapai. Tetapi permasalahan yang masih dihadapi adalah mengenai belum adanya kajian mengenai penurunan debit air dan ketika musim kemarau datang, tiba-tiba terjadi penurunan debit air sampai mencapai lebih kurang 60%. Hal ini yang perlu dilakukan kewaspadaan. Karena dampak jika tidak dilakukan penyelesaian akan secara tiba-tiba menimbulkan kekeringan lahan pertanian secara mendadak. dampak negatif yang ditimbulkan berkurangnya sumber mata air, berkurangnya daerah tangkapan air, menurunnya kualitas lahan, meningkatnya alih fungsi lahan, tingginya kondisi rawan air. maka dari itu permasalahan yang mampu mengungkit segala permasalahan lainnya adalah menurunnya volume sumber daya air.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil analisis terhadap integrasi kondisi saat ini, peluang terhadap dampak negatif, serta pengaruh utama yang melatarbelakangi terjadinya isu lingkungan diantaranya alih fungsi lahan produktif, pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), sampah dan sanitasi perkotaan, tsunami dan gunung api, serta lahan pertanian. Kelima isu diatas menjadi isu strategis di Kabupaten Banyuwangi sebagai konsekuensi dari pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Formulasi instrumen kebijakan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
-

Kebijakan lingkungan dipahami sebagai muatan yang menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan agar bisa berjalan secara simultan.

2. Saran

Kabupaten Banyuwangi perlu mempertimbangkan isu strategis lingkungan terutama isu alih fungsi lahan produktif, pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), sampah dan sanitasi perkotaan menjadi isu strategis di Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan dalam melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk rencana strategis maupun kajian lingkungan hidup strategis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahossane, K. (2001). *Manufacturing Industry and Sustainable Development in Cote d'Ivoire*. Unido, Viena.
- Goodland. Robert. (1995). *The Concept of Environmental Sustainability*. Washington DC.
- Jones O. Charles. (1994). *Public Policy*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Michael P. Todaro. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M.B., dan A.M. Huberman. (1990). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Nugroho, Rian, (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Resosudarmo, B.P. dan E. Thorbecke. "The Impact of Air Pollution Policies on National Economic Growth and Household Incomes in Indonesia: A CGE Analysis." Makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Seminar BPP Teknologi, Jakarta, 7 Agustus 1996.
- Syakrani, (2011). *Desentralisasi Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Alam: Blessing or Cursing?* Bandung: JIANMaP IAPA.
-